

ABSTRAK

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN INVESTASI ILEGAL (STUDI PADA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI LAMPUNG)

**Oleh:
Andre Luis Hadi**

Kurangnya pemahaman mengenai investasi ilegal masih jelas terlihat pada masyarakat Lampung. Hal ini disebabkan karena maraknya industri investasi ilegal di Indonesia yang merugikan banyak pihak terkhusus provinsi Lampung. Otoritas Jasa Keuangan bertindak sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011, memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, menyediakan saluran pengaduan nasabah, dan melakukan kampanye edukasi publik untuk melindungi hak-hak hukum publik, dengan membekukan izin usaha, memberi kompensasi kepada korban, dan mengambil tindakan hukum terhadap penjahat atau orang yang terlibat dalam investasi ilegal.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penanggulangan investasi ilegal? (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penanggulangan investasi ilegal?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridisempiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Otoritas Jasa Keuangan berperan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Otoritas Jasa Keuangan juga membuat satgas waspada investasi yang bertugas untuk mengawasi investasi, khususnya investasi yang tidak jelas seperti investasi ilegal. (2) Faktor-faktor penghambat OJK dalam penanggulangan investasi ilegal adalah masalah kelembagaan, korban tidak melapor, kurangnya pemahaman masyarakat terkait produk keuangan, ketidakpastian status perusahaan yang diketahui masyarakat (Legal/Ilegal), dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat.

Kata kunci: Peran, OJK, Penanggulangan, Investasi Ilegal.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN OVERCOMING ILLEGAL INVESTMENTS (STUDY AT THE LAMPUNG PROVINCE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OFFICE)

By:
Andre Luis Hadi

The lack of understanding regarding illegal investment is still clearly visible among the people of Lampung. This is due to the rise of the illegal investment industry in Indonesia which is detrimental to many parties, especially Lampung province. The Financial Services Authority acts in accordance with Law no. 21 of 2011, has the authority to impose sanctions, provide customer complaint channels, and carry out public education campaigns to protect public legal rights, by freezing business licenses, compensating victims, and taking legal action against criminals or people involved in investment illegal.

The problems in this thesis are (1) What is the role of the Financial Services Authority in tackling illegal investment? (2) What factors become obstacles in overcoming illegal investment? This research uses a normative juridical and empirical juridical approach with primary data and secondary data, where each data is obtained from literature and field research. Data analysis was carried out descriptively qualitatively.

The results of this research show that (1) the Financial Services Authority's role is to educate the public, provide facilities for customer complaints, and handle illegal investments by revoking business permits, or providing compensation and/or filing lawsuits in court. The Financial Services Authority has also created an investment alert task force whose task is to monitor investments, especially unclear investments such as illegal investments. (2) Factors inhibiting the OJK in tackling illegal investment are institutional problems, victims not reporting, lack of public understanding regarding financial products, uncertainty about the status of companies known to the public (Legal/Illegal), and lack of socialization to the public.

Keywords: Role, OJK, Prevention, Illegal Investment.